

**USULAN PROPOSAL
PENELITIAN**



**Dampak Edukasi Dan Evaluasi Berkala Terhadap Peningkatan Pengelolaan Kinerja
Keuangan Pada Wilayah Kerja KPPN Solok**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**Nurhayati, SE.MM (Ketua)
NIDN 1008116904
Bayu Hendro Asmoro (Anggota)**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMINSOLOK
Maret 2019**

DAFTAR ISI

RINGKASAN

- 1. PENDAHULUAN**
- 2. TINJAUAN PUSTAKA**
- 3. METODE**
- 4. JADWAL**
- 5. DAFTAR PUSTAKA**

LAMPIRAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Dampak Edukasi Dan Monitoring Evaluasi (Monev) Berkala Terhadap Peningkatan Pengelolaan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Ikpa) Pada Instansi Pengelola Keuangan Apbn Wilayah Kerja Kppn Solok

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Nurhayati, SE.MM

NIDN : 1008116904

Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Nomor HP : 081363368530

Alamat surel (e-mail) :

Anggota Tim

Nama Lengkap : Bayu Hendro Asmoro

Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Tahun Pelaksanaan : 2018-2019

Sumber Dana : Mandiri

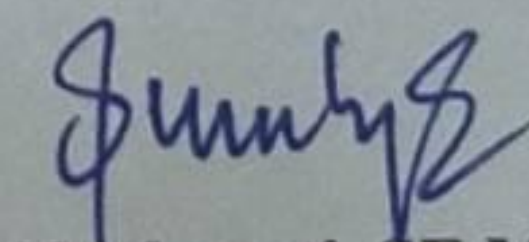
Biaya Tahun Berjalan : Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Biaya Keseluruhan : Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
(Julita Sukraini, SE.M.Si)
NIDN 1017116201

Solok, 15 Maret 2019

Ketua,


(Nurhayati, SE.MM)
NIDN 1008116904


Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY
(Dr. Wahyu Indah Mursalini, SE, MM)
NIDN: 1019017402

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

RINGKASAN

Anggaran negara menjadi salah satu alat politik fiskal untuk mempengaruhi arah dan percepatan pendapatan nasional. Anggaran yang akan digunakan tergantung pada keadaan ekonomi yang dihadapi. Pada keadaan ekonomi yang normal dipergunakan anggaran negara seimbang, kemudian dalam keadaan ekonomi yang deflasi biasanya dipergunakan anggaran negara defisit dan sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang inflasi dipergunakan anggaran negara yang surplus(Nourmanita, 2016).

Tugas pokok aparat birokrat sebagai abdi negara juga sebagai abdi masyarakat antara lain tercermin dalam tugas pokoknya dibidang pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Era reformasi yang didengungkan sebagai era perubahan menuju kondisi yang lebih baik dari era sebelumnya menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi cenderung menurun. Ini sebagai akibat buruknya pelayanan birokrasi terhadap masyarakat yang direpresentasikan dengan akuntabilitas aparat birokrat (Mulaningsih, 2019).

Pemerintah pusat dalam hal ini selaku pengelola APBN, secara berkesinambungan memperbaiki tata kelola keuangan, melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan negara berkualitas yang profesional, transparan dan akuntabel. Melalui berbagai proses, dirumuskan formulasi-formulasi bagaimana menciptakan tata kelola keuangan yang baik sekaligus memberikan kemudahan dalam memahami pengelolaan pelaksanaan anggaran.

Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran ditandai dengan telah banyak diterbitkannya peraturan-peraturan secara terstruktur oleh pemerintah pusat mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran hingga pengawasan anggaran. Selain itu perkembangan pemanfaatan teknologi informasi juga memberikan dampak akan munculnya formulasi-formulasi yang lebih sederhana sebagai pedoman atau acuan dalam penetapan kinerja pelaksanaan anggaran.

Formulasi berupa indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran ditujukan untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi pengelola keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah, namun hal tersebut ternyata belum berdampak signifikan dalam peningkatan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Hambatan

dalam meningkatkan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran antara lain terkait dengan edukasi berupa tingkat pemahaman para pengelola keuangan dalam pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran. Hambatan tersebut bisa menjadi salah satu penyebab pengelola keuangan APBN kurang atau bahkan tidak memahami bagaimana mengelola APBN secara benar sehingga menyebabkan kinerja pelaksanaan anggaran tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendala lain berupa tingkat implementasi pemahaman pengelola keuangan APBN dan tindak lanjutnya yang belum optimal pada pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran dalam bentuk monitoring dan evaluasi juga turut menyebabkan penurunan kinerja pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Permasalahan Yang Diuraikan Tersebut Maka, Peneliti Mengambil Judul: Dampak Edukasi Dan Evaluasi Berkala Terhadap Peningkatan Pengelolaan Kinerja Keuangan Pada Wilayah Kerja KPPN Solok

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh edukasi terhadap peningkatan pengelolaan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada instansi pengelola keuangan APBN wilayah kerja KPPN Solok. (2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan monitoring evaluasi (monev) secara berkala terhadap peningkatan pengelolaan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada instansi pengelola keuangan APBN. (3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh edukasi dan monitoring evaluasi (monev) terhadap peningkatan pengelolaan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada instansi pengelola keuangan APBN wilayah kerja KPPN Solok.

Tahapan yang dilakukan pada metode penelitian ini adalah (1) Observasi lapangan (2) Membagikan kuisioner. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif korelatif. Luaran dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional ber ISSN, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.

Kata kunci maksimal 5 kata

Edukasi, Monitoring Evaluasi (Monev) Berkala dan Peningkatan Pengelolaan Penilaian indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

LATAR BELAKANG

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi serta menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis(Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, 2015).

Anggaran negara menjadi salah satu alat politik fiskal untuk mempengaruhi arah dan percepatan pendapatan nasional. Anggaran yang akan digunakan tergantung pada keadaan ekonomi yang dihadapi. Pada keadaan ekonomi yang normal dipergunakan anggaran negara seimbang, kemudian dalam keadaan ekonomi yang deflasi biasanya dipergunakan anggaran negara defisit dan sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang inflasi dipergunakan anggaran negara yang surplus(Nourmanita, 2016).

Tugas pokok aparat birokrat sebagai abdi negara juga sebagai abdi masyarakat antara lain tercermin dalam tugas pokoknya dibidang pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Era reformasi yang didengungkan sebagai era perubahan menuju kondisi yang lebih baik dari era sebelumnya menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi cenderung menurun. Ini sebagai akibat buruknya pelayanan birokrasi terhadap masyarakat yang direpresentasikan dengan akuntabilitas aparat birokrat (Mulaningsih, 2019).

Pemerintah pusat dalam hal ini selaku pengelola APBN, secara berkesinambungan memperbaiki tata kelola keuangan, melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan negara berkualitas yang profesional, transparan dan akuntabel. Melalui berbagai proses, dirumuskan formulasi-formulasi bagaimana menciptakan tata kelola keuangan yang baik sekaligus memberikan kemudahan dalam memahami pengelolaan pelaksanaan anggaran.

Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran ditandai dengan telah banyak diterbitkannya peraturan-peraturan secara terstruktur oleh pemerintah pusat mulai dari

perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran hingga pengawasan anggaran. Selain itu perkembangan pemanfaatan teknologi informasi juga memberikan dampak akan munculnya formulasi-formulasi yang lebih sederhana sebagai pedoman atau acuan dalam penetapan kinerja pelaksanaan anggaran.

Formulasi berupa indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran ditujukan untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi pengelola keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah, namun hal tersebut ternyata belum berdampak signifikan dalam peningkatan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Hambatan dalam meningkatkan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran antara lain terkait dengan edukasi berupa tingkat pemahaman para pengelola keuangandalam pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran. Hambatan tersebut bisa menjadi salah satu penyebab pengelola keuangan APBN kurang atau bahkan tidak memahami bagaimana mengelola APBN secara benar sehingga menyebabkan kinerja pelaksanaan anggaran tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendala lain berupa tingkat implementasi pemahaman pengelola keuangan APBN dan tindak lanjutnyayang belum optimal padapengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran dalam bentuk monitoring dan evaluasi juga turut menyebabkan penurunan kinerja pelaksanaan anggaran.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan telah menyusun rumusan jangka panjang dalam pencapaian peningkatan indikator kinerja pelaksanaan anggaran termasuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Paket Undang-undang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan bentuk nyata implementasinya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan seperti dengan pemberian pemahaman, implementasi pemahaman serta tindak lanjut atas implementasi pemahaman para pengelola keuangan APBN dalam bentuk edukasi dan monitoring evaluasi (monev) yang selama ini telah dilaksanakan, ternyata dirasa kurang mampu memberikan dampak yang maksimal dalam peningkatan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Hal ini tercermin dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang belum konsisten dalam

beberapa tahun terakhir terakhir. Data penilaian kinerja di tahun 2015 sebesar 92,13%, tahun 2016 sebesar 92,27%, tahun 2017 sebesar 98,50%, tahun 2018 sebesar 91,98% serta tahun 2020 sebesar 92,27%.

Pengelola keuangan APBN sebagai orang yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan negara termasuk juga meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, harus melihat inkonsistensi kinerja pelaksanaan anggaran yang terjadi beberapa tahun terakhir di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok dari sisi tingkat pemahaman akan pengelolaan keuangan negara dalam hal ini edukasi serta bentuk implementasi dan tindak lanjut dari pemahaman dari pengelola keuangan APBN dalam mengelola kinerja pelaksanaan anggaran. KPPN Solok sebagai bendahara umum negara yang menyalurkan APBN di daerah dituntut mampu menemukan alternatif solusi melalui optimalisasi pemahaman pengelola keuangan APBN pada instansi di wilayah kerjanya, sehingga dapat menjaga konsistensi peningkatan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada periode mendatang.

KPPN Solok telah melakukan berbagai upaya pengelolaan keuangan APBN dalam rangka meningkatkan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Selanjutnya, sepengetahuan peneliti belum ditemukan ada peneliti lain yang meneliti apakah terdapat pengaruh atau tidak terkait edukasi dan monitoring evaluasi (monev) secara berkala terhadap peningkatan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui apakah pengaruh edukasi dan monitoring evaluasi (monev) para pengelola keuangan APBN dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan Dampak Keterampilan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Jumlah Produksi Batako (Studi Kasus Produksi Batako Kota Solok).

Berdasarkan Permasalahan Yang Diuraikan Tersebut Maka, Peneliti Mengambil Judul Dampak Edukasi Dan Evaluasi Berkala Terhadap Peningkatan Pengelolaan Kinerja Keuangan Pada Wilayah Kerja KPPN Solok.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

TINJAUAN PUSTAKA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada awalnya merupakan indikator kinerja utama penyerapan anggaran dan pencapaian output yang kemudian bertransformasi mengikuti kompleksitas perkembangan pengelolaan keuangan dan tata cara pengukurannya sebagaimana mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor SE-32/MK.1/2015.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk mengukur pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dalam bentuk indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Pada lingkup yang lebih sederhana, dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah memiliki tugas memberikan dukungan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan APBN instansi yang berada di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2018).

Ruang lingkup merupakan batasan yang memiliki cakupan dari kegiatan penelitian dengan tujuan memberikan penekanan yang lebih terfokus pada suatu permasalahan. Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), rincian ruang lingkup dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yang selanjutnya didelegasikan ke KPPN sebagai instansi vertikal di daerah. Pengukuran tingkat pemahaman akan pengetahuan pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran termasuk implementasinya di daerah menjadi tanggung jawab KPPN, para pengelola keuangan secara berkala di monitoring dalam hal implementasi pemahaman serta dilakukan evaluasi dalam bentuk tindak lanjut atas pemahaman pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran.
2. Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran belanja Kementerian

Negara/Lembaga yang dilakukan oleh masing-masing Menteri/Ketua Lembaga selaku pelaksana anggaran yang didelegasikan kepada instansi/instansi pelaksana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengelola keuangan secara mandiri memiliki tanggung jawab dalam peningkatan pemahaman pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran, pengukuran tingkat pemahaman menjadi pertimbangan evaluasi sehingga bisa memberikan kontribusi yang maksimal dalam peningkatan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Tingkat pemahaman, implementasi pemahaman serta tindak lanjut atas hasil evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan kinerja pelaksanaan anggaran.

3. Monitoring dan evaluasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan dengan beberapa kriteria yang terbagi sesuai kebutuhan.

Penilaian atas indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) merupakan acuan dalam menentukan tindak lanjut atau evaluasi terhadap pengelola keuangan APBN dalam mengimplementasikan tingkat pemahamannya dalam pelaksanaan anggaran. Pengelola keuangan negara tertinggi berada dalam kekuasaan Presiden yang selanjutnya didelegasikan kepada Menteri terkait sesuai kewenangannya. Kewenangan yang diberikan bersifat umum dan khusus, kewenangan yang bersifat umum mayoritas terkait dengan kebijakan umum dan arah prioritas pengelolaan APBN sedangkan kewenangan yang bersifat khusus terkait dengan teknis pengelolaan APBN secara rinci.

Monitoring dan evaluasi adalah dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda yaitu kata monitoring dan evaluasi namun memiliki keterkaitan yang erat dalam pencapaian tujuan yang optimal. Monitoring adalah proses mengumpulkan dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan spesifik. Selanjutnya evaluasi mengacu pada proses monitoring tersebut, namun pada tingkatan yang lebih jauh, informasi yang telah dikumpulkan lantas dianalisis, dan hasilnya dijadikan sebagai bahan untuk menyampaikan suatu pertimbangan yang lebih penting (Mustofa, 2012).

Evaluasi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan monitoring serta berkaitan erat. Evaluasi memiliki fungsi sebagai pengukur kemajuan, alat perencanaan dan alat perbaikan. Evaluasi ini berfungsi sebagai alat untuk penilaian suatu kegiatan agar lebih baik kedepannya, sehingga kesalahan-kesalahan yang ditemukan saat kegiatan dapat segera dicari solusinya agar tidak terjadi lagi di waktu mendatang. (Elfindri, 2011).

Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai dan memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian(Elfindri, 2011).

Perbedaan antara monitoring dan evaluasi adalah monitoring dilakukan pada saat program masih berjalan sedangkan evaluasi dapat dilakukan baik sewaktu sewaktu program itu masih berjalan ataupun program itu sudah selesai.

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

METODE

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian deskriptif korelatif. Menurut Sugiyono (2012: 59). Deskriptif korelatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen, sedangkan variabel yang terpengaruh oleh variabel independen disebut variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dampak Edukasi Dan Monitoring Evaluasi (Monev) Berkala dan variabel dependennya adalah Pengelolaan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Ikpa).

Data kuantitatif data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung yang diperoleh dari kuisioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer adalah sumber data yang menghasilkan data secara langsung dari sumber yang diteliti atau data secara langsung dari hasil observasi dengan cara

memberikan kuesioner kepada pengelola keuangan instansi APBN di wilayah kerja KPPN Solok yang dapat memberikan data atau informasi yang berhubungan dengan penulisan proposal penelitian ini.

Berdasarkan data yang diperoleh Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola keuangan APBN di wilayah kerja KPPN Solok yang terdiri atas 64 pengelola keuangan APBN. Mengingat jumlah populasi tidak terlalu banyak, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel total (*Total Sampling*). Alasan pengambilan *total sampling* adalah jumlah populasi kurang dari 100, seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Pada penelitian ini, sampel yang diteliti adalah 64 pengelola keuangan instansi APBN di wilayah kerja KPPN Solok.

Langkah-langkah penelitian ini adalah 1) Observasi lapangan, 2) merumuskan permasalahan, 3) membuat dan membagikan kuisisioner, 4) merumuskan dan menganalisis data yang didapatkan ke program olah data, 5) mengolah data, 6) melakukan analisis data sesuai materi, 7) penyusunan laporan penelitian, 8) menyusun artikel dan publikasi.

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Afriska, T. (2017). *Pengaruh Pengembangan Karir, Motivasi Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka*.
2. Anjarwati, E. (2016). *Pengaruh Penguasaan Kosakata Terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa SD Gugus Dewi Kunthi Kota Semarang*.
3. Elfindri. (2011). Beberapa Teknik (MONEV) Monitoring Evaluasi. *Jurnal Kesehatan Komunitas Andalas University*, 1(3), 106–128.
4. Giffari, A. S. (2018). *Analisis Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*.
5. Lestari, L. (2016). *Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Program Studi Manajemen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016*. file:///D:/MS Word/Research Methode/Simamora (2004346) - 2016 - Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Program Studi Manajemen Jurusan Manajemen Fakultas.pdf
6. Maharani, H. (2019). *Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya Lampung Tengah)*.
7. Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Raja Grafindo Persada, 1–127.
8. Mokodompit, W. (2016). *Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pos Indonesia Cabang Makassar*.
9. Mulaningsih, S. (2019). Akuntabilitas Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana Pada Badan Penegelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara. *E Jurnal Katalogis Universitas Tadulako*, 4(5), 128–140.
10. Mustofa, M. L. (2012). *Monitoring dan Evaluasi : Konsep dan Penerapannya bagi Pembinaan Kemahasiswaan* (Cetakan I, Issue I). UIN-MALIKI Press.
11. Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, G. putu A. S. J. (2015). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *EJournal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
12. Nourmanita, N. A. (2016). Belanja Publik (Expenditure Assignment) Antara Masalah dan Efektivitas Anggaran Belanja. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada*, 4, 31–48.

13. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.*
14. Peraturan Menteri Keuangan RI. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.*
15. Prastowo, A. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. *In Metode Penelitian Kualitatif*, 208–220.
16. Safitri, D. L. (2018). *Pengaruh Pendidikan Terhadap Karyawan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut Dengan Melalui Pelatihan dan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Intervening.* 15(29), 10–38.
17. Septarina, M. (2017). *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Lamanya Bekerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang.* 6, 5–9.
18. Widiasih, E., & Suminar, T. (2015). Monitoring dan Evaluasi Program Pelatihan (Studi di Mitra Batik Desa Bentar Kabupaten Brebes). *Journal of Nonformal Education Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, 1(1).
19. Yulianita, A. (2017). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan CV. Cipta Nusa Sidoarjo.* 6, 5–9.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. KubungKab. SolokTelp. 0755-20127

Surat Tugas

No. 03/ST-P/LP3M-UMMY/III-2019

Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Nurhayati, SE, MM
NIDN : 1008116904
Pangkat/GolonganRuang : Lektor III/d
Prodi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Alamat :

Untuk Melaksanakan Kegiatan Penelitian Dengan Judul "Dampak Edukasi Dan Evaluasi Berkala Terhadap Peningkatan Pengelolaan Kinerja Keuangan Pada Wilayah Kerja KPPN Solok", Pada Tahun Akademik 2018/2019

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Solok, 15 Maret 2019
Kepala LP3M UMMY

DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.
NIDN. 1019017402